

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA REVIU)**

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2016 - 2021**



Disusun Oleh :

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama periode 2016-2021. Dengan adanya RENSTRA ini diharapkan penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan lebih terarah, berdaya guna dan berhasil guna serta tercapai sasaran yang diharapkan dan pada setiap akhir tahunnya dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem akuntabilitas yang baik, tepat, jelas dan nyata.

RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Bupati, yang dituangkan dalam tujuan, sasaran dan indicator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat perubahan teknologi dan sosial ekonomi yang begitu cepat dan RENSTRA ini masih penuh kekurangan, untuk itu kami berharap sumbang saran yang bersifat obyektif dan konstruktif untuk penyempurnaan agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan.

Semoga RENSTRA ini bermanfaat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk melaksanakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, November 2018
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Lombok Tengah,

Ir. MUHAMAD KAMRIN
NIP. 19651130 199203 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	7
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	15
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	20
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	20
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	21
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	23
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	25
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	25
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	26
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	28
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	34
BAB VIII PENUTUP	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (akselerasi pertumbuhan ekonomi) dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan), dimana sector kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah dan secara prinsipil direncanakan serta disusun sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional, dilakukan secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, diintegrasikan dengan tata ruang wilayah dengan memperhatikan potensi dan prioritas daerah serta dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan, diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya integrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut, maka Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan pelaksanaan program kerja pembangunan kelautan dan perikanan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Hal tersebut didukung oleh kinerja aparatur dan kelembagaan dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Renstra satuan kerja merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan isu-isu permasalahan strategis pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah serta program-program strategis yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana, bertahap dan mempunyai tolak ukur serta target pencapaian kinerja yang jelas melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah.

Renstra merupakan turunan/penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih serta merupakan pedoman perencanaan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun rencana kerja tahunan periode 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara 5587);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta

- tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 2);
 - n. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam merencanakan dan merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan selama kurun waktu lima tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah adalah menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan untuk menghasilkan program-program pembangunan kelautan dan perikanan yang terpadu, focus dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketersediaan dokumen Renstra juga diharapkan sebagai acuan untuk mengukur dan menilai capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah serta untuk evaluasi capaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Tengah kurun waktu 2016-2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra k/l dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang ingin dicapai di akhir tahun renstra.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah (Perbup) Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah.

Pada Pasal 2 Perbup Nomor 83 Tahun 2016, dinyatakan bahwa kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

1. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di bidang kelautan dan perikanan
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah diatur dalam Pasal 3 dan 4 Perbup Nomor 83 Tahun 2016 yaitu :

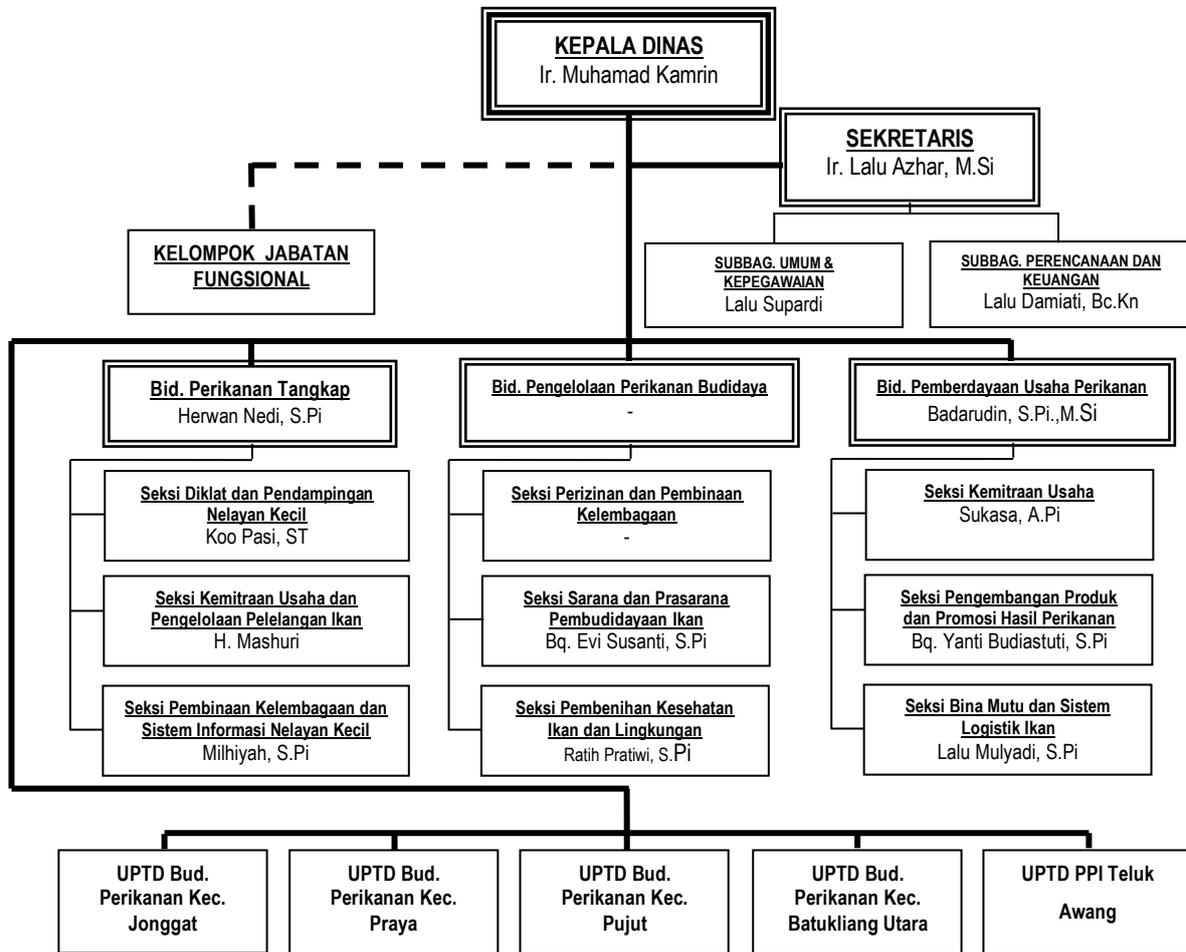
1. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya dan pemberdayaan usaha perikanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya dan pemberdayaan usaha perikanan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya dan pemberdayaan usaha perikanan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Kelautan dan Perikanan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Perbup Nomor 83 Tahun 2016 terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
 - 1) Bidang Perikanan Tangkap
 - a. Seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil
 - b. Seksi Kemitraan Usaha dan Pengelolaan Pelelangan Ikan
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil
 - 2) Bidang Perikanan Budidaya
 - a. Seksi Perizinan dan pembinaan Kelembagaan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan
 - c. Seksi Pembenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 - 3) Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan
 - a. Seksi Kemitraan Usaha
 - b. Seksi Pengembangan Produk dan Promosi Hasil Perikanan
 - c. Seksi Bina Mutu dan Sistem Logistik Ikan
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Bagan susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana gambar bagan berikut ini :

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2018 sebanyak 53 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Pangkat dan Golongan

- Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 Orang
- Pembina Tk. I (IV/b) : 1 Orang
- Pembina (IV/a) : 3 Orang
- Penata Tk. I (III/d) : 15 Orang
- Penata (III/c) : 10 Orang
- Penata Muda Tk. I (III/b) : 6 Orang
- Penata Muda (III/a) : 6 Orang
- Pengatur Tk. I (II/d) : 1 Orang

- Pengatur (II/c) : 6 Orang
- Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 2 Orang
- Juru (I/d) : 1 Orang
- Juru Muda (I/c) : 1 Orang

2. Jabatan Struktural

- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 3 Orang
- Eselon IVa : 15 Orang
- Eselon IVb : 4 Orang
- Fungsional Umum : 30 Orang

3. Kualifikasi Pendidikan

- Pasca Sarjana (S2) : 2 Orang
- Sarjana (S1) : 26 Orang
- Diploma : 4 Orang
- SLTA : 19 Orang
- SLTP : 1 Orang
- SD : 1 Orang

2.2.1 Aset Yang Dikelola

- a. Perikanan Tangkap
 - Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Teluk Awang
 - Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Kute
 - Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Gerupuk
 - Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Kelongkong
 - Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Selong Blanak
 - Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Bumbang
 - SPDN Awang
 - Kapal Pengawasan
- b. Perikanan Budidaya
 - Balai Benih Ikan (BBI) Gerunung
 - Balai Benih Ikan (BBI) Aik Bukak
 - Balai Benih Ikan (BBI) Pemepek
 - Balai Benih Ikan (BBI) Bonjeruk
 - Tambak Dinas Peras
- c. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - Pabrik Es
 - Cold Storage
 - Bangsal Pengolahan Hasil Perikanan

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan atas asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah berkoordinasi dengan instansi terkait pada pemerintahan daerah dan provinsi serta instansi vertical dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Pada pelaksanaan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh sekretariat dan bidang-bidang sesuai dengan fungsi teknisnya di dalam mengkoordinasikan kegiatan, antara lain untuk kegiatan administrasi, perencanaan anggaran dan evaluasi dilaksanakan oleh sekretariat, untuk pelaksanaan teknis kegiatan perikanan tangkap dilaksanakan oleh bidang perikanan tangkap, kegiatan perikanan budidaya dilaksanakan oleh bidang perikanan budidaya dan untuk kegiatan pengolahan dan pemasaran dilaksanakan oleh bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan.

Hasil pencapaian kinerja pelayanan di bidang kelautan dan perikanan dan alokasi anggaran selama kurun waktu 2011-2015 disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		Ton		2.295,68	2.323,23	2.351,11	2.379,32	2.407,87	2.470,37	2.515,74	2.675,38	2.283,05	2.334	107,61	108,29	113,79	95,95	96,93
2	Jumlah Produksi Benih Ikan			Ekor	7.438.955	8.554.798	9.410.279	10.821.820	4.500.000	7.775.000	8.900.000	9.824.900	11.410.276	5.837.876	104,52	104,04	104,41	105,44	129,73
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		Ton		46.514,36	58.788,51	68.657,26	79.706,82	83.901,30	43.507,56	45.321,90	48.451,16	89.706,82	93.281,62	93,54	77,09	70,57	112,55	111,46
4	Jumlah Wirausaha Perikanan Budidaya			Orang	129	130	130	130	130	228	449	231	293	430	176,74	345,38	177,69	225,38	330,77
5	Jumlah Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya			Kawasan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
6	Volume Produk Olahan Hasil Perikanan			Ton	3.723	3.835	3.950	4.068	4.190	3.205,67	4.216,30	4.048,58	4.453,44	4.084,03	86,10	109,94	102,50	109,47	97,47
7	Jumlah Rata-rata Konsumsi Ikan		Kg/Kapita /Tahun		18.20	18.87	19.82	20.41	21.02	18.17	18.92	24.87	26.34	23.40	99,84	100,26	125,48	129,05	111,32

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut, bahwa terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu 1) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton); 2) Jumlah Produksi Benih Ikan (ekor); 3) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton); 4) Jumlah Wirausaha Perikanan Budidaya (orang); 5) Jumlah Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya (kawasan); 6) Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton) dan 7) Jumlah Rata-rata Konsumsi Ikan Perkapita (kg/kapita/tahun).

Dari 7 indikator kinerja tersebut, secara umum realisasi pencapaian target kinerja tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio capaian yaitu dengan membandingkan realisasi dan target lebih dari 85%. Hal ini didukung oleh adanya program kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Namun pada indikator jumlah produksi perikanan budidaya, pada tahun 2012 dan 2013, realisasi dibawah 85%. Hal ini disebabkan adanya perubahan iklim yang sangat mempengaruhi proses budidaya. Dan pada indikator jumlah produksi benih ikan pada tahun terakhir renstra terdapat penurunan target, hal ini disebabkan kontribusi benih lobster tidak diperhitungkan, capaian target hanya berasal dari benih yang dihasilkan Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat.

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2011)	2 (2012)	3 (2013)	4 (2014)	5 (2015)	1 (2011)	2 (2012)	3 (2013)	4 (2014)	5 (2015)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	91.116.959	132.274.380	168.697.600	229.643.500	537.179.600	87.270.811	125.956.563	153.132.700	179.019.179	375.301.622	95,78	95,22	90,77	77,96	69,87	231.782.408	184.136.175
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		118.937.860	134.200.000	170.016.000	459.649.000		115.049.875	133.945.000	168.750.000	455.890.400		96,73	99,81	99,26	99,18	176.560.572	174.727.055
Program Peningkatan dan Pengembangan Aparatur	64.600.000					63.725.500					98,65					12.920.000	12.745.100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		85.622.003	140.712.280	191.801.000	145.925.903		81.042.000	138.079.000	188.468.950	140.854.880		94,65	98,13	98,26	96,52	112.812.237	109.688.966
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	415.021.450	849.623.950	593.946.500	890.956.800	1.248.753.000	388.834.000	802.472.000	590.948.500	813.034.600	1.240.340.350	93,69	94,45	99,50	91,25	99,33	799.660.340	767.125.890
Program Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Pendedayagunaan Sumberdaya Laut	81.076.500					81.037.500					99,95					16.215.300	16.207.500

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan		192.821.000	207.635.230	370.182.750	162.750.000		190.208.500	197.585.400	353.800.250	160.777.950		98,65	95,16	95,57	98,79	186.677.796	180.474.420
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	3.019.524.926	795.598.727	703.866.300	442.368.655	466.788.395	2.969.351.808	746.051.810	693.238.000	439.916.655	462.992.200	98,34	93,77	98,49	99,45	99,19	1.085.629.401	1.062.310.095
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1.294.188.570	886.764.072	1.525.793.310	1.822.020.800	1.491.622.463	1.276.499.070	836.222.519	1.512.532.900	1.779.259.200	1.457.324.925	98,63	94,30	99,13	97,65	97,70	1.404.077.843	1.372.367.723
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	247.267.000	675.825.700	1.075.838.080	423.665.750	770.932.839	246.336.100	625.710.500	977.455.200	419.164.550	758.945.650	99,62	92,58	90,86	98,94	98,45	638.705.874	605.522.400
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar		2.113.347.464	1.229.754.300	1.126.345.000	1.177.297.000		2.061.442.950	1.198.199.700	1.118.102.600	1.164.451.110		97,54	97,43	99,27	98,91	1.129.348.753	1.108.439.272
Total	5.212.795.405	5.850.815.156	5.780.443.600	5.667.000.255	6.460.898.200	5.113.054.789	5.584.156.717	5.595.116.400	5.459.515.984	6.216.879.087	98,09	95,44	96,79	96,34	96,22	5.794.390.523	5.593.744.595

Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2011 sampai 2013 meningkat, karena didukung oleh anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang meningkat. Namun pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan yang disebabkan anggaran DAK Bidang Kelautan dan Perikanan juga menurun. Secara keseluruhan realisasi anggaran tiap tahun baik, dapat dilihat dari rasio antara realisasi dan anggaran tiap tahun diatas 95%. Namun bila dilihat dari masing-masing program, terdapat rasio antara realisasi dan anggaran kurang dari 90%, diantaranya pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun 2014 dan 2015 realisasi anggaran hanya sebesar 77,96% dan 69,87%. Hal ini disebabkan antara lain penggunaan listrik di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang masih rendah karena fasilitas belum beroperasi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi NTB

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan visi yang selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritime dunia, yaitu **“Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional”**.

- Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain;
- Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata;
- Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari;
- Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam Renstra KKP terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni :

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Jika dicermati pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan yang ingin dicapai oleh KKP sebagai berikut :

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan
2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
3. Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan
4. Tersedianya kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang efektif
5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan
6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif
7. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang kompeten, professional dan berkepribadian
8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses
9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntable

Sedangkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB menetapkan visi “Mewujudkan Masyarakat Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB yang Maju”. Kata “**Maju**” yang mengandung makna bahwa tujuan akhir (the ultimate goal) dari pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi NTB berupa tercapainya masyarakat perikanan dan kelautan Provinsi NTB yang maju dan ditandai dengan meningkatnya pendapatan serta daya beli dengan cara pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara arif, bijaksana, efisien dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kualitas lingkungan sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan (*on a sustainable basic*) dan berkeadilan (*equitable basic*).

Dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB memiliki misi yang lebih kompleks dari indikator yang terdapat pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah. Misi pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi NTB dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan pelayanan dan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
2. Meningkatkan kesejahteraan nelayan
3. Meningkatkan kemampuan pelayanan jasa kepelabuhan perikanan wilayah Pulau Lombok
4. Meningkatkan kemampuan pelayanan jasa kepelabuhan perikanan wilayah Pulau Sumbawa
5. Meningkatkan kemampuan penerapan dan perekayasa teknologi penangkapan ikan
6. Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan
7. Meningkatkan kemampuan pelayanan penerapan teknologi budidaya ikan air tawar
8. Meningkatkan kemampuan pelayanan penerapan teknologi budidaya ikan laut dan air payau
9. Meningkatkan kemampuan pengendalian hama dan penyakit ikan serta pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan
10. Meningkatkan kesejahteraan pengolah dan pemasar produk perikanan dan kelautan
11. Meningkatkan kemampuan pengendalian mutu dan keamanan pangan hasil perikanan dan kelautan
12. Memelihara kelestarian dan daya dukung sumberdaya kelautan dan perikanan

Jika dicermati pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB selain berorientasi pada kinerja aspek produksi dan pengembangan SDM juga berorientasi aspek teknis pelayanan jasa kepelabuhan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi NTB juga sangat kompleks, terdiri dari 65 sasaran yang ingin dicapai.

Analisis terhadap Renstra KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dapat disajikan pada tabel komparasi berikut.

Tabel 2.3. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kab/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	Produksi Perikanan Budidaya	113.340,57 ton	1.090.273 ton	31,32 juta ton
2	Produksi Benih Ikan Air Tawar	6.288.639 ekor	26.000.000 ekor	-
3	Produksi Perikanan Tangkap	2.477 ton	159.948 ton	6.982.560 ton
4	Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan	4.343,16 ton	208.200 ton	6,3 juta ton
5	Tingkat Konsumsi Ikan	27,75 kg/kapita	33 kg/kapita	54,49 kg/kapita
6	Produksi Garam Rakyat	3.230 ton	175.000 ton	4,10 juta ton
7	POKMASWAS yang Aktif	11 kelompok	139 kelompok	1.020 kelompok

2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Tengah selalu mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hasil telaahan rencana tata wilayah terhadap kebutuhan pelayanan SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Rencana pengembangan system jaringan transportasi laut meliputi pengembangan	Telah dibangun Pelabuhan Perikanan Nusantara Awang	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rencana dan kondisi sudah sejalan namun masih membutuhkan Pengembangan	Kecamatan Pujut, Praya Timur

Pelabuhan dengan dan lanjutan
 Perikanan luasan hasil pembangunan
 Nusantara reklamasi 9 PPN Awang
 (PPN) Awang di Ha yang masih
 Kecamatan membutuhkan
 Pujut menjadi pendanaan
 Pelabuhan sekitar 50 M
 Nasional

Tabel 2.5. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, berupa kawasan konservasi perairan, meliputi kawasan konservasi laut daerah (KKLD) dan kawasan mangrove	Telah dicadangkan kawasan konservasi taman wisata perairan Teluk Bumbang berdasarkan Perbup No.40 Tahun 2013	Program Perlindungan dan Konservasi SDKP	Rencana dan kondisi telah sejalan, namun tetap diperlukan kegiatan pengembangan pengelolaan kawasan konservasi	Kecamatan Pujut, Praya Timur, Praya Barat dan Praya Barat Daya

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi dari bidang teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan

Unit Eselon III	Permasalahan yang Dihadapi	Penyebab
Sekretariat	Pelayanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi program pusat, provinsi dan kabupaten belum optimal 2. Pengelolaan asset belum berjalan dengan maksimal
Perikanan Tangkap	Masih rendahnya produktivitas nelayan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih dominannya armada penangkapan skala kecil 2. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelelangan belum memenuhi standar 3. Kualitas SDM masih rendah
Perikanan Budidaya	Masih rendahnya produktivitas pembudidaya ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan benih dan induk bermutu masih terbatas 2. Akses permodalan dengan lembaga keuangan masih kurang 3. Sarana dan prasarana budidaya yang memenuhi persyaratan teknis masih kurang
Pemberdayaan Usaha Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya kualitas dan kuantitas produk olahan hasil perikanan dan kelautan - Tingkat konsumsi ikan masih rendah - Kuantitas dan Kualitas garam rakyat masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya SDM dan penguasaan teknologi produk olahan hasil perikanan 2. Tata niaga pemasaran hasil perikanan belum dikelola dengan baik 3. Sarana dan prasarana pengolahan garam masih kurang

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021, telah ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”**.

- Beriman : masyarakat yang melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA.
- Sejahtera : masyarakat yang mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya, yaitu sandang, pangan, papan serta mendapatkan rasa aman.
- Bermutu : masyarakat yang mampu berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, karena punya tingkat pendidikan dan kesehatan yang memadai, sehingga mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia.

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 tersebut, diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan kearifan local
2. Meningkatkan kesejahteraan social, kecerdasan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender
3. Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas
4. Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan public berkualitas

Dari misi yang telah ditetapkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah mengisi Misi Ketiga yaitu **Mendorong Kemajuan Ekonomi Daerah dan Kemakmuran Masyarakat Melalui Perkuatan Struktur Ekonomi Masyarakat Dengan Dukungan Stabilitas Kamtibmas.**

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Pengelolaan Perangkat Daerah yang Partisipatif, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan masih rendah - Kualitas dan kuantitas sarana prasarana kelautan dan perikanan masih kurang memadai - Penguasaan teknologi kelautan dan perikanan masyarakat perikanan masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar - Jumlah masyarakat perikanan (pembudidaya, nelayan, pengolah, pemasar, petambak garam) cukup banyak

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Masih rendahnya produktivitas pembudidaya ikan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan benih dan induk bermutu masih terbatas - Akses permodalan dengan lembaga keuangan masih kurang - Sarana dan prasarana budidaya yang memenuhi persyaratan teknis masih kurang 	Dukungan pembiayaan melalui APBD, APBN dan hibah lainnya
3	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Masih rendahnya produktivitas nelayan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih dominannya armada penangkapan skala kecil - Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan belum memenuhi standar - Kualitas SDM masih rendah 	Dukungan pembiayaan melalui APBD, APBN dan hibah lainnya

4	Peningkatan Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan	Terbatasnya kualitas dan kuantitas produk olahan hasil perikanan dan kelautan	- Terbatasnya SDM dan penguasaan teknologi produk olahan hasil perikanan	Adanya pembinaan dan pelatihan oleh pemda, provinsi maupun balitbang kelautan dan perikanan
5	Peningkatan Tingkat Konsumsi Ikan	Tingkat Konsumsi Ikan masih rendah	Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya makan ikan untuk meningkatkan nilai gizi keluarga yang masih rendah.	Adanya dukungan dana untuk kegiatan sosialisasi GEMARIKAN, lomba masak ikan, bazaar produk hasil perikanan dan sebagainya
6	Peningkatan Produksi Garam Rakyat	Kuantitas dan kualitas garam rakyat masih rendah	- Penguasaan teknologi masih rendah - Kelembagaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir belum tertata dengan baik	Dukungan program dan kegiatan dari pemda, provinsi dan pusat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah disajikan pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang di Kecamatan Pujut menjadi Pelabuhan Nasional	Pengembangan dan lanjutan pembangunan PPN Awang yang masih membutuhkan pendanaan yang cukup besar	- Ketersediaan anggaran masih kurang - Koordinasi dan kerjasama lintas sektoral masih rendah - Investasi di bidang kelautan dan perikanan yang masih sangat rendah	Dukungan pembiayaan melalui APBN

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi dan implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah disusun isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan belum optimal
2. Sarana prasarana pendukung produksi masih belum memadai
3. Penguasaan teknologi kelautan dan perikanan masih kurang
4. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga teknis perikanan dan penyuluh perikanan
5. Lemahnya akses permodalan bagi usaha menengah, kecil dan mikro sektor kelautan dan perikanan
6. Pendapatan perkapita masyarakat kelautan dan perikanan masih rendah
7. Infrastruktur pendukung pembangunan kelautan dan perikanan belum memadai
8. Konflik penggunaan ruang

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, ditetapkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu meningkatnya produktifitas perikanan dan hasil olahan perikanan

Sedangkan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap
2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya
3. Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang telah dijabarkan tersebut, dapat diringkas pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan produktivitas dan daya saing sector agraris serta ketahanan pangan		Persentase Laju pertumbuhan produksi kelautan dan perikanan	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
		a. Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
		b. Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase Laju pertumbuhan produksi Perikanan Budidaya (%)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		c. Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	Persentase Laju pertumbuhan produksi Olahan Perikanan (%)	1,89	2,00	2,00	2,00	2,00
			Persentase Laju pertumbuhan produksi Garam (%)	1,99	1,99	2,00	2,00	2,00

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rangkaian langkah terpadu dalam mewujudkan tercapainya tujuan serta sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Tengah. Strategi dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu			
MISI III	Mendorong Kemajuan Ekonomi Daerah dan Kemakmuran Masyarakat Melalui Perkuatan Struktur Ekonomi Masyarakat Dengan Dukungan Stabilitas Kamtibmas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Meningkatkan produktivitas dan daya saing sector agraris serta ketahanan pangan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Peningkatan Kualitas, Kuantitas dan kapasitas Armada Penangkapan Ikan	
			Penerapan teknologi tepat guna dan Kuantitas Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan	
			Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Diklat Kecakapan Nelayan	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Usaha nelayan dan penguatan system informasi nelayan kecil	
			Penyediaan sarana untuk mendukung operasional pelelangan Ikan dan fasilitasi kemitraan nelayan kecil	
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi perikanan budidaya	Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi perikanan budidaya	Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya
				Penyediaan sarana untuk mendukung operasional dempond tambak
				Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan CBIB dan CPIB bagi POKDAKAN dan UPR
				Pembinaan dan Pemberdayaan POKDAKAN dan UPR
				Peningkatan Kuantitas dan Kualitas produksi benih ikan
				Penyediaan sarana untuk mendukung operasional Balai Benih Ikan (BBI)

			Bantuan benih ikan dan restocking
	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi olahan hasil perikanan	Kemitraan Pemasaran hasil Perikanan
			Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
			Pemberdayaan Kelompok Pengolah dan Pemasar hasil Perikanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kebijakan dan strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 yang telah diuraikan tersebut, akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, secara garis besar program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

A. Program Urusan Wajib

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diarahkan untuk fasilitasi aparatur guna penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan alat tulis kantor
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan untuk fasilitasi aparatur untuk menjalankan tupoksi

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini diarahkan untuk fasilitasi aparatur dan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk akuntabilitas perencanaan dan pelaporan SKPD

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

B. Program Urusan Pilihan

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan untuk pengembangan usaha perikanan tangkap guna peningkatan produksi perikanan dari hasil penangkapan ikan, baik di perairan laut maupun perairan umum daratan

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- Pemberdayaan Nelayan Kecil
- Pendampingan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil
- Pengembangan dan Pengelolaan Pelelangan Ikan dan Kemitraan Usaha

2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan dari hasil budidaya ikan dan produksi benih ikan air tawar serta untuk mewujudkan kawasan perikanan unggulan

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
- Peningkatan kapasitas Pembudidaya ikan
- Pengembangan Bibit ikan Unggul

3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk olahan hasil perikanan

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Penetapan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2016-2021, yang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, pendanaan dan kelompok sasaran yang akan dicapai dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel. 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan				Persentase Laju pertumbuhan produksi kelautan dan perikanan (%)	1,49	1,55		1,55		1,55		1,55		1,55						
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap			Persentase Laju pertumbuhan produksi Perikanan Tangkap (%)	1,19	1,20		1,20		1,20		1,20		1,20						
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap		Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	2,362,00	2,390,40	2.106.497,20	2,419,00	2.356.523,00	2,448,03	4.076.825,00	2,477,40	4.117.621,00	2,507,13	4.158.798,00	2,507,13	16.816.264,20		Bidang Perikanan Tangkap	
		1 Pemberdayaan Nelayan Kecil		Jumlah sarana penangkapan ikan (paket)	9	9	2.106.497,20	10	2.130.223,00	11	2.938.303,00	13	2.967.706,03	15	2.997.383,66	67	13.140.112,89		Seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil	Kec. Praya Kec. Praya Tengah
	2 Pendampingan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil		Jumlah Kelembagaan usaha perikanan yang dibina (kelompok)	24	33	0,00	34	159.765,00	40	499.270,00	43	504.266,10	45	509.308,86	78	1.672.609,96		Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil	Kec. Praya Barat Kec. Praya Barat Daya	
	3 Pengembangan dan Pengelolaan Pelelangan Ikan dan kemitraan Usaha		Jumlah sarana pelelangan ikan (paket)	0	3	0,00	3	66.535,00	3	639.252,00	4	645.648,87	4	652.105,48	17	2.003.541,35		Seksi Kemitraan Usaha dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	Kec. Praya Timur	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya				Persentase Laju pertumbuhan produksi Perikanan Budidaya (%)	0,90	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00						
		Program Perikanan Budidaya		Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun)	71.899,00	72.615,00	3.812.287,30	73.341,10	1.846.483,50	74.074,51	1.651.100,00	74.815,26	1.667.611,00	75.563,41	1.684.288,00	75.563,41	10.661.769,80		Bidang Perikanan Budidaya	
				1. Ikan 2. Rumput Laut	33.792,53 38.106,47	34.129,05 38.485,95		34.470,32 38.870,78		34.815,02 39.259,49		35.163,17 39.652,09		35.514,80 40.048,61		35.514,80 40.048,61				
		1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah Benih Ikan Air Tawar (Ekor)	5,903,787	6,000,000	775.144,40	6,096,213	319.993,00	6,192,426	320.000,00	6,288,639	320.000,00	6,351,525	320.000,00	6,351,525	2.055.137,40		Seksi Pembenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Kec. Pujut, Kec. Praya, Kec. Jonggat, Kec. Pringgarata	

		2 Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya (paket)	25,00	30,00	3.037.142,90	30,00	1.391.997,50	30,00	1.199.012,00	30,00	1.214.203,00	30,00	1.229.545,00	175,00	8.071.900,40	Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan	Kec. Praya Barat, Kec. Praya Barat Daya, Kec. Praya Timur
		3 Peningkatan Kapasitas Pembudidaya Ikan	Kelompok Pembudidaya Ikan yang dibina (orang)	0,00	0,00	0,00	60,00	134.493,00	60,00	132.088,00	60,00	133.408,00	60,00	134.743,00	240,00	534.732,00	Seksi Perizinan dan Pembinaan Kelembagaan	Kec. Batukliang Utara,
Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan			Persentase Laju pertumbuhan produksi Olahan Perikanan (%)	1,89	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00					
			Persentase Laju pertumbuhan produksi Garam (%)	1,99	1,99		2,00		2,00		2,00		2,00					
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Produksi olahan hasil perikanan (Ton/Tahun) Produksi Garam Rakyat (Ton)	4.084,03 3.116,00	4.165,70 3.178,00	927.851,65	4.249,01 3.242,00	692.350,05	4.334,00 3.307,00	623.000,00	4.420,68 3.373,00	629.230,00	4.509,09 3.440,50	635.523,00	4.509,09 3.440,50	3.507.954,70	Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan	
	1 Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (paket)	3,00	3,00	927.851,65	3,00	692.350,05	3,00	623.000,00	4,00	629.230,00	4,00	635.523,00	20,00	3.507.954,70	Seksi Pengembangan Produk dan Promosi Hasil Perikanan Seksi Kemitraan Usaha Seksi Bina Mutu dan Sistem logistic Ikan	Kec. Praya Timur (Kidang dan Bilelendo) Kec. Praya Kec. Jonggat Kec. Batukliang Kec. Batukliang Utara Kec. Pringgarata Kec. Pujut, Kec. Praya Tengah	

Program dan Kegiatan yang mendukung capaian tujuan dan sasaran renstra SKPD																		
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah			Nilai Sakip Pemda (nilai)															
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggara urusan			Nilai LKIJP SKPD (nilai)															
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran (%)	100	100	658,271.82	100	567,179.45	100	637,429.00	100	643,804.00	100	650,243.00	100	3,156,927.27	Dislutkan	Praya
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	- Jasa Telepon (bulan) - Jasa air (m3) - Jasa listrik (rekening) - Jasa internet (mega byte)	12 1.000 11 20	12 1.000 11 20	172,887.82	12 1.008 11 20	259,800.00	12 1.010 11 20	311,724.00	12 1.050 11 20	282,202.86	12 1.100 11 20	335,525.39				
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- STNK roda empat (unit) - STNK roda dua (unit)	6 42	6 51	193,323.40	6 51	122,730.00	6 51	135,387.00	6 51	124,254.17	6 51	125,496.90				
		3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Laporan bulanan dan Tahunan keuangan (dokumen)	13	13	111,070.00	13	75,010.00	13	75,010.00	13	75,968.87	13	76,728.67				
		4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor (bulan)	12	12	20,138.00	12	34,639.45	12	40,308.00	12	35,409.22	12	35,763.37				
		5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komputer/Laptop/Server dan Perlengkapannya (unit)	0	0	-	0	-	0	-	10	50,000.00	0	-				
		6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi (kali)	10	10	160,852.60	10	75,000.00	12	75,000.00	12	75,968.87	13	76,728.67				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentasi sarana dan prasarana kondisi baik (%)	100	100	263,245.00	100	20,000.00	100	20,000.00	100	20,200.00	100	20,402.00	100	343,847.00	Dislutkan	Praya
		1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor terpelihara (unit)	7	7	263,245.00	7	20,000.00	7	20,000.00	7	20,200.00	7	20,402.00				
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	46,899.50	100	47,700.00	100	42,600.00	100	43,026.00	100	43,457.00	100	223,682.50	Dislutkan	Praya

		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dokumen Perencanaan (dokumen)	3	3	46,899.50	3	47,700.00	3	42,600.00	3	43,026.00	3	43,457.00				
				- Laporan Kinerja (dokumen)	5	5		5		5		5		5					

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja perangkat daerah menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun (2016-2021) mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun) - Ikan - Rumput Laut	33.792,53	34.129,05	34.470,32	34.815,02	35.163,17	35.514,80	35.514,80
		38.106,47	38.485,95	38.870,78	39.259,49	39.652,09	40.048,61	40.048,61
2.	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	2.362,00	2.390,40	2.419,00	2.448,03	2.477,40	2.507,13	2.507,13
3.	Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun)	4.084,03	4.165,70	4.249,01	4.334,00	4.420,68	4.509,09	4.509,09
4.	Produksi Garam Rakyat (Ton/Tahun)	3.116,00	3.178,00	3.242,00	3.307,00	3.373,00	3.440,50	3.440,50

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan 2016-2021 ini merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Bupati, yang dituangkan dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah. RENSTRA ini merupakan suatu dokumen yang diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam menentukan arah kebijakan, langkah operasional sekaligus pengendali kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 2016-2021.

RENSTRA juga nantinya sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas (Renja Dinas) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahun dan juga sebagai pedoman dalam mengevaluasi capaian kinerja kepemimpinan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, sehingga cita-cita mulia untuk mewujudkan masyarakat Lombok Tengah dalam hal ini masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dapat terwujud.